PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 10 April 2026 Halaman: 2

PROGRAM WFH BAGI SEBAGIAN ASN MULAI DIBERLAKUKAN

Pemkot Pastikan Layanan Publik Tetap Normal

YOGYA (KR) - Terhitung mulai Jumat (10/4) hari ini Pemkot Yogyakarta mulai menerapkan program work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi sebagian aparatur sipil negara (ASN). Pemkot pun memastikan layanan publik tetap berjalan normal seperti hari biasa.

Penjabat (Pj) Sekda Kota Yogya Dedi Budiono, menjelaskan program WFH diberlakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terkait pelayanan langsung ke masyarakat. "Menindaklanjuti surat edaran dari Mendagri, kami juga sudah menerbitkan surat edaran terkait WFH. Sudah ditandatangani Walikota Yogyakarta di awal April serta sudah beredar," jelasnya, Kamis (9/4).

Sedianya program tersebut bakal mulai diberlakukan pekan lalu. Akan tetapi kebetulan pada Jumat lalu bertepatan hari libur nasional sehingga baru bisa diberlakukan pekan ini.

Dedi menguraikan, OPD yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat diperbolehkan menerapkan WFH. Misalnya seperti di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan manajemen internal Pemkot Yogyakarta. Namun tidak semua ASN di OPD tersebut akan menerapkan bekerja dari rumah. Pejabat eselon II seperti kepala dinas dan eselon III seperti kepala bidang tetap harus bekerja di kantor atau work from office (WFO). "Yang jelas, eselon dua dan eselon tiga tidak boleh WFH. Unit pelayanan yang bersentuhan langsung kepada masyarakat juga tidak boleh. Hanya OPD yang tidak memberikan pelayanan langsung yang diperbolehkan WFH," urainya.

Menurutnya, jumlah ASN Pemkot Yogyakarta yang melakukan WFH maksimal sekitar 20 persen. Sehingga jumlahnya tergolong sedikit. Pasalnya sebagian besar ASN Pemkot Yogyakarta ada di bidang pelayanan. Dicontohkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) para guru tetap masuk sekolah. Begitu pula Dinas Kesehatan yang membawahi puskesmas, OPD di kemantren dan kelurahan dan lainnya.

Bagi ASN yang menerapkan WFH, imbuh Dedi, harus sudah punya konsep atau rencana apa yang mau dikerjakan di rumah. Rencana kerja itu diajukan dan dipantau atasan. Hal itu sebagai bentuk pengendalian WFH harus ada hasil kerja. Selain itu ada sistem monitoring berlapis pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS) untuk mengajukan hasil kinerja. "Untuk monitoring proses atau progres atasan langsung harus mengecek secara berkala apakah yang direncanakan itu benar-benar dilaporkan dan dikerjakan," tambahnya.

Sebelumnya Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo, menegaskan pihaknya telah menyiapkan beberapa skenario langkah strategis untuk penghematan. Salah satunya dengan mengikuti kebijakan WFH setiap hari Jumat. Namun unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak akan diberlakukan WFH. Seluruh pelayanan publik Pemkot Yogyakarta dipastikan tetap beroperasi secara penuh hingga hari Jumat guna menjaga kualitas layanan kepada warga.

"Kami juga akan menerapkan plafonisasi (pembatasan kuota BBM kendaraan dinas). Kalau mobil akan saya jatah maksimal lima liter per hari. Kalau sepeda motor saya jatah satu liter per hari. Kalau itu dilakukan bisa mengurangi hampir 30 persen belanja BBM," terangnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005